

# SKRIPSI

## IMPLEMENTASI ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENGHITUNGAN BIAYA PERIZINAN YANG DIHASILKAN OLEH KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI SELAMA TAHUN 2006

Oleh  
M. ARIEF RAHMAT HIDAYAT  
00153033



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi



FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008

No.Alumni Universitas	M.Arief Rahmat Hidayat	No.Alumni Fakultas
Biodata		
a). Tempat/ Tgl Lahir : Bukittinggi/ 01 Oktober 1981. b). Nama Orang Tua : Ardi dan Melwizar. c). Fakultas : Ekonomi. d). Jurusan : Akuntansi. e). No. BP : 00 153 033. f). Tgl Lulus : 04 Agustus 2008. g). Predikat Lulus Memuaskan. h). IPK : 3.24. i). Lama Studi : 8 Tahun. j). Alamat Orang Tua : Jln.Sanjai dalam No.51, Bukittinggi – Sumatera Barat		

Implementasi Activity Based Costing Dalam Penghitungan Biaya Perizinan Yang Dihasilkan Oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi Selama Tahun 2006.

Skripsi Strata S1 oleh : M.Arief Rahmat Hidayat

Pembimbing : Drs.Riwayadi. MBA,Akt



#### ABSTRAK

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan tarif perizinan yang diatur oleh Peraturan Daerah No.05, Tahun 2003, No.18 Tahun 2003, No.18 Tahun 2004 dan No. 06 Tahun 2005 tidak berdasarkan atas informasi biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk menghasilkan perizinan tersebut, melainkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah bersangkutan yang tidaklah mencerminkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Dikarenakan informasi biaya ini sangat bermanfaat untuk menentukan berapa sebenarnya tarif yang layak yang seharusnya diberikan kepada peminta izin, maka penulis mencoba menghitung biaya izin-izin dengan pendekatan kegiatan, dengan membatasi penelitian hanya dengan memasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu selama tahun 2006. Konsep yang penulis gunakan untuk menentukan sebagian biaya perizinan tersebut adalah Activity Based Costing.

Setelah konsep Activity Based Costing diterapkan, diperoleh hasil bahwa dari 15 macam tarif yang ditetapkan untuk perizinan – perizinan yang dihasilkan selama tahun 2006, ternyata 9 diantaranya lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu untuk menghasilkan perizinan tersebut. Berdasarkan informasi ini sangatlah baik jika Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan Activity Based Costing untuk menentukan biaya perizinan yang dihasilkan oleh Peraturan Daerah No. 05, Tahun 2003, No.18 Tahun 2003, No.18 Tahun 2004 dan No. 06 Tahun 2005 untuk periode berikutnya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Oktober 2007, dengan penguji :

Abstrak telah disetujui oleh penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Drs Riwayadi.MBA,Akt	Rita Rahayu. SE.Msi,Akt

Mengetahui

Ketua Jurusan :

Drs.Syahril Ali.Msi,Akt  
NIP. 131598288

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas / Universitas dan mendapatkan nomor alumnus.

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah kondisi yang bercirikan terpenuhinya kebutuhan setiap individu seperti perasaan aman, pangan, sandang dan hak-hak individu lainnya. Harapan yang mengisyaratkan adanya sinergi positif antara aspek-aspek kehidupan yang ada. Ekonomi adalah salah satu aspek yang turut berperan dan menjadi faktor yang signifikan dalam menilai sejahtera atau tidaknya suatu negara.

Ekonomi adalah bidang yang terkait dengan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berwujud material. Praktek dilapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak pelaku yang terlibat didalam kegiatan ekonomi sebuah negara. Secara umum pelaku ekonomi tersebut dikelompokkan atas 4 kelompok yakni:

1. Rumah tangga keluarga.
2. Dunia usaha.
3. Pemerintah
4. Masyarakat luar negeri ( kalau negara tersebut menganut sistem ekonomi terbuka ).

Masing-masing pelaku ekonomi mempunyai tuntutan tersendiri. Rumah tangga keluarga menginginkan terpenuhinya kebutuhan mereka dengan harga yang murah dan mudah didapat dan tersedianya fasilitas yang memadai untuk kelancaran aktifitas mereka. Dunia usaha menginginkan pajak dan atau retribusi

yang murah, iklim usaha yang kondusif. Pemerintah menginginkan masukan yang besar berupa pajak dan retribusi serta sumber pendapatan lainnya. Masyarakat luar negeri menginginkan upah yang murah, kondisi keamanan yang bagus. Dengan adanya perbedaan tuntutan tersebut, agar terwujud keselarasan maka dirumuskanlah regulasi.

Regulasi ekonomi di Indonesia diejawantahkan dalam berbagai format. Salah satu format regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kota. Jenis regulasi ini dihasilkan setelah melalui proses yang cukup panjang yang melibatkan pemerintah kota, wakil rakyat dan komponen masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Walaupun regulasi ini berdiri sendiri namun pedoman yang digunakan adalah berasal dari :

1. Undang-undang
2. Peraturan pemerintah
3. Keputusan presiden
4. Keputusan menteri.
5. Peraturan Daerah tertentu yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Propinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu daerah tingkat II, Bukittinggi mempunyai beberapa Peraturan daerah Kota untuk mengatur kegiatan ekonominya. Diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1997, tentang perbaikan terhadap penggalian jalan umum dalam Kotamadya Bukittinggi. Perda ini disusun untuk mengatur mekanisme penggalian jalan umum untuk

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan tarif perizinan yang diatur oleh Peraturan Daerah No.05 Tahun 2003, No.18 Tahun 2003, No.18 Tahun 2004 dan No.06 Tahun 2005 tidak berdasarkan atas informasi biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk menghasilkan perizinan tersebut, melainkan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan yang tidaklah mencerminkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Dikarenakan informasi biaya ini sangat bermanfaat untuk menentukan berapa sebenarnya tarif yang layak yang seharusnya diberikan kepada peminta izin, maka penulis mencoba menghitung biaya izin dengan pendekatan kegiatan, dengan membatasi penelitian hanya dengan memasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu selama tahun 2006. Konsep yang penulis gunakan untuk menentukan sebagian biaya perizinan tersebut adalah Activity Based Costing..

Setelah konsep Activity Based Costing diterapkan, diperoleh hasil, bahwa dari 15 macam tarif yang ditetapkan untuk perizinan-perizinan yang dihasilkan selama tahun 2006, ternyata 9 diantaranya lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu untuk menghasilkan perizinan tersebut.

#### 5.2 Saran

Agar model *Activity Based Costing* yang lengkap, yang menyertakan biaya dari semua unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan perizinan yang dihasilkan



## DAFTAR REFERENSI

- Blocher, Edward J, Kung H. Chen, dan Thomas W. Lin. 2000. Manajemen Biaya : Dengan Tekanan Strategi . Terjemahan Cost Management : A Strategic Emphasis oleh Dra. A Susty Ambarrini, Msi, Akt. Jakarta : Salemba Empat.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 1997. Cost Management : Accounting and Control. 2 th Edition. South Western College Publishing.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 2000. Manajemen Biaya : Akuntansi dan pengendalian. Terjemahan Cost Management : Accounting and Control. 2 th Edition. Thomson Learning Asia. Jakarta Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. Teori Akuntansi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hicks, Douglas T. 1999. Activity Based Costing : Making It Works For Small and Mid Sized Companies. 2 th Edition. John Wiley & Sons, Inc
- Hornngren, Charles T. dan George Foster. 1991. Cost Accounting : A Managerial Emphasis. 7 th Edition. Prentice Hall.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan 2004. Jakarta : Salemba Empat.
- Jumariam et al. 2001. Ejaan : Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyadi. 1993. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.
- Rayburn, Letricia Gayle. 1999. Akuntansi Biaya : Dengan Menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya. Edisi Keenam , Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Rida Yeni. 2000. Kemungkinan Penerapan Sistem Activity Based Costing Pada PT. X. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Weetman, Pauline. 2003. Financial and Management Accounting - An Introduction. 3 th Edition. Prentice Hall.
- Weygandt, Jerry J, Donald E Kieso, dan Paul D. Kimmel. 1999. Managerial Accounting : Tools For Business Decision Making . John Wiley & Sons, Inc.